

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Anggaran Besar KJP Plus

## Kontrol dan Parameter Program Belum Jelas

JAKARTA, KOMPAS — Mekanisme pengawasan, cara penyaluran, dan tolok ukur keberhasilan pemberian komponen tambahan dalam program Kartu Jakarta Pintar Plus dinilai belum jelas. Ada peluang besar penyalahgunaan bantuan sosial yang diusulkan mencapai sekitar Rp 4 triliun itu.

Mekanisme yang dimaksud di antaranya cara pencairan tunai atau nontunai, pengawasan, kursus yang bisa masuk dalam KJP Plus, komponen biaya, dan verifikasi data penerima. Meskipun mekanisme belum jelas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan anggaran KJP Plus sekitar Rp 4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2018.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Nahdiana mengatakan, saat ini seluruh mekanisme untuk KJP Plus tengah dalam pembahasan. "Ditargetkan (pembahasan itu) selesai akhir Desember 2017," katanya di kantornya, di Jakarta Timur, Jumat (24/11).

Program KJP Plus merupakan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno. Anggaran ini salah satu nomenklatur biaya terbesar dalam RAPBD 2018. Dalam APBD DKI 2017, KJP (tanpa plus) sekitar Rp 3,2 triliun.

Komponen biaya KJP Plus dalam RAPBD 2018 masuk di anggaran Bantuan Sosial. Anggaran terdiri dari bantuan biaya personal siswa miskin Rp 3,9 triliun dan peningkatan mutu pendidikan bagi peserta KJP yang lolos seleksi perguruan tinggi negeri senilai Rp 101,4 miliar.

Hasil pembahasan mekanisme KJP Plus itu nantinya dikukuhkan dalam peraturan gubernur yang mengatur KJP Plus.

Tahapan selanjutnya verifikasi

data penerima ditargetkan pada Januari. Dalam program KJP dulu, sekolah menjadi penentu penerima KJP. Dalam KJP Plus, verifikasi data dilakukan tim terpadu yang tengah menyusun data tunggal warga Jakarta yang layak menerima bantuan sosial. Data ini nantinya juga digunakan untuk pemberian bantuan-bantuan sosial lain. Tim terpadu ini di antaranya kelurahan, ketua RT/RW, dan tokoh masyarakat.

### Tambah peserta dan nilai

Jumlah peserta KJP Plus diusulkan 872.024 orang. Tahun lalu, jumlah penerima sekitar 790.000 orang. Besaran nominal bantuan juga bertambah dengan alasan penyesuaian inflasi serta hasil survei harga kebutuhan sekolah dan data Bank Dunia.

Sebanyak 80.000 orang dalam daftar penerima KJP Plus 2018 dialokasikan untuk bantuan anak tidak sekolah. Bantuan ini direncanakan diberikan untuk anak usia 6-21 tahun yang tidak sekolah atau putus sekolah. Bantuan diberikan saat si anak sudah terdaftar di lembaga kursus atau sekolah. Jenis lembaga yang diperbolehkan masih dibahas.

Nahdiana mengatakan, data anak tidak sekolah ini dari basis data terpadu Kementerian Sosial tahun 2017. "Data itu masih perlu diverifikasi," ucapnya.

Selain itu, ada juga usulan pemberian bantuan untuk bimbingan pelajar kelas XII yang disebut *bridging*. Menurut Nahdiana, melanjutkan tidaknya ke jenjang perguruan tinggi tetap jadi pilihan penerima KJP Plus.

Tambahan bantuan diharapkan menstimulus peningkatan pendidikan warga miskin, baik dengan meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi maupun menurunkan angka putus sekolah.

### Tidak boleh tunai

Nahdiana mengajak warga berpartisipasi mengawasi pelaksanaan KJP Plus. Pada program KJP lalu, tingkat penyalahgunaan diperkirakan sekitar 1 persen.

"Sistem KJP yang dulu ditentukan oleh toko dan belanja apa saja yang diperbolehkan masih banyak disalahgunakan untuk

beli HP atau hal-hal di luar kebutuhan pendidikan. Sebaiknya dievaluasi dulu penyaluran bantuan yang dulu, bukan ditambah lagi," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Abdullah Ubaid di Jakarta, Sabtu (25/11).

Tambahan bantuan itu akan sulit diawasi apabila disalurkan secara tunai tanpa syarat tambahan. Bantuan akan lebih tepat sasaran apabila dialihkan sebagai subsidi atau bantuan nontunai, salah satunya bantuan biaya transportasi. Pemerhati Pendidikan Doni Koesocoma mengatakan, tujuan *bridging* dan bantuan anak tidak sekolah juga sangat rawan manipulasi data.

Menurut anggota Komisi E DPRD DKI, Belly Bilalussalam, Jumat lalu, KJP menysar anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Kini, KJP Plus menysar anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak putus sekolah. Namun, DPRD menilai jumlah penerima berlebihan dan harus dikurangi. Sekretaris Komisi E Veri Yonnevil mengatakan, KJP Plus tetap program nontunai. "Tak boleh ada pencairan tunai," ujarnya. (HILN/IRE)

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas Sindo Tempo  
Indopos Pos Kota Warta Kota

## Anggaran Besar KJP Plus

**KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS**

 <b>KJP</b> Rp 3,2 triliun (APBD 2017)	<b>Anggaran</b>	<b>KJP PLUS</b> Rp 4 triliun (RAPBD 2018): <ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 3,9 triliun, bantuan pendidikan siswa miskin.</li> <li>Rp 101,4 miliar, program peningkatan mutu peserta KJP lolos perguruan tinggi.</li> </ul>
Siswa sekolah usia 6-21 tahun  792.495 orang	<b>Sasaran</b>	Anak usia 6-21 tahun yang bersekolah dan tidak
Gratis naik transjakarta	<b>Jumlah peserta</b>	872.024 orang. 80.000 merupakan anak usia 6-21 tahun yang putus atau tidak sekolah
Sekolah sebagai penentu penerima dana KJP	<b>Keuntungan peserta KJP</b>	Diskon belanja perlengkapan sekolah, gratis masuk museum dan wahana pendidikan
	<b>Penentuan penerima</b>	Tim terpadu untuk verifikasi! (akan dibentuk). Sekolah hanya menjadi pengguna data dari tim verifikasi.
<b>Dana KJP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>SD: Rp 210.000 per bulan</li> <li>SMP: Rp 260.000 per bulan</li> <li>SMA: Rp 375.000 per bulan</li> <li>SMK: Rp 390.000 per bulan</li> <li>Bantuan kejar paket belajar: Rp 210.000 per bulan</li> </ul>	<b>Dana KJP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>SD: Rp 250.000 per bulan</li> <li>SMP: Rp 300.000 per bulan</li> <li>SMA: Rp 420.000 per bulan</li> <li>SMK: Rp 450.000 per bulan</li> <li>Bantuan kejar paket belajar: Rp 300.000 per bulan</li> <li>Program persiapan kelulusan atau seleksi masuk perguruan tinggi</li> <li>Rp 500.000 pada bulan ketiga kelulusan.</li> <li>Program ditujukan untuk siswa kelas XII yang jumlahnya mencapai 53.829 orang.</li> </ul>	

Sumber: Litbang "Kompas"/ERN, diolah dari pemberitaan "Kompas"

INFOGRAFIK: PANDU